

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini serta hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Gua Alam Batu Cermin setiap tahun mengalami peningkatan yakni tahun 2012 sebesar Rp 32.030.000,00 tahun 2013 sebesar Rp 40.915.000,00 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 125.195.000,00. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan (*event*) penting yang berskala internasional terjadi pada tahun 2013 dengan adanya Sail Komodo dan berpengaruh besar pada tingkat kunjungan wisatawan ke obyek wisata Gua Alam Batu Cermin. Namun hasil penelitian ini pada tahun 2014 berbeda dengan realisasi penerimaan yang tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Rp 43.925.000, hal ini terjadi selisih sebesar Rp 81.270.000,00. yang dipengaruhi oleh: Penarikan retribusi masuk obyek wisata Gua Alam Batu Cermin tidak sesuai dengan banyaknya pengunjung yang masuk berkelompok.
2. Penerapan Regulasi Daerah tentang sistem penerimaan Retribusi Masuk Obyek Wisata Gua Alam Batu Cermin belum terlaksana dengan baik

6.2 Saran

Pariwisata Gua Alam Batu Cermin adalah salah satu potensi penerimaan Retribusi di Kabupaten Manggarai Barat. Disarankan kepada pengelola dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Gua Alam Batu Cermin, harus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung pariwisata seperti: mengadakan kegiatan (*event*) berskala internasional untuk mempromosikan tentang setiap obyek wisata yang berada di Kabupaten Manggarai Barat khususnya Obyek Wisata Gua Alam Batu Cermin dengan cara mengemasnya dalam paket wisata termasuk ekowisata agar wisatawan lebih mudah untuk berkunjung kesetiap obyek wisata, Perlu Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Wisata kuliner, perbaiki selter, menyiapkan tempat parkir, penertipan hewan peliharaan, penambahan tempat sampah, menyiapkan papan informasi bagi wisatawan agar tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan, pentas seni, pameran kebudayaan dan menyiapkan souvenir daerah.
2. Untuk meminimalisir resiko dan timbulnya kecurangan yang akan terjadi perlu adanya sistem pengendalian internal seperti : wisatawan wajib membayar retribusi masuk obyek wisata perorang dan selama berada dalam lingkungan obyek wisata, wisatawan wajib memiliki karcis tanda masuk obyek wisata Gua Alam Batu Cermin.

DAFTAR PUSTAKA

- Austriana, Ida. 2005. “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata*”. Disertasi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Bastian Indra.2007 . *Sistem Akuntansi Sektor Publik* Penerbit Salemba Empat
- Badrudin, Rudy. 2001. “*Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pengembangan Industri Pariwisata*”.Jurnal Kompak, Nomor 3, hal 1-13 dan halaman 384-403
- Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Buku Saku Pariwisata Nusa Tenggara Timur*
- Eka. 2005. ”Retribusi Daerah Potensial Kabupaten Gianyar (*tesis*)”. : Universitas Udayana. Denpasar
- I Wayan Gede Sedana . 2011 *Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan wisatawan terhadap penerimaan Retribusi obyek wisata dan anggaran Pembangunan Kabupaten Gianyar*
- Mahmudi. 2010 *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta
- Mardiasmo dan Makhfatih,Akhmad. 2000. “*Perhitungan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Magelang*”, *Laporan Akhir*, Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010 *Kepariwisataan Dan Perjalanan*: PT. Raja Grafindo Persada. . Jakarta
- Nasrul Qadarrochman. 2010 *Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, kota Semarang
- Pendit, S. Nyoman. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Pendit, S. Nyoman. 1990. *Inventarisasi Industri Pariwisata Indonesia, Indonesia dalam Era Globalisasi*, Bank Summa. Jakarta.
- Pendit S. Nyoman, 1986. *Ilmu Pariwisata* Cetakan 3
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010 *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia* Yogyakarta
- Salah, Wahab. 2003. *Manajemen Kepariwisataan*: PT. Pramadya Paramita . Jakarta

- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Satrio, Dicky. 2002, “*Perkembangan Pendapatan Pemerintah Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Blora dan Faktor Yang Mempengaruhi*”. Disertasi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Susiana, 2003. “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata Kota Surakarta (1985-2000)*”. Disertasi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Spillane, J James. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius Yogyakarta
- Spillane, J James. 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa*. Yogyakarta.
- Sunyoto Danang. 2013 *Metodologi Penelitian Akuntansi* Penerbit PT.Refika Aditama, Bandung
- Siahaan, Marihot, P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wahab, Salah. 2003. *Industri Pariwisata Dan Peluang Kesempatan Kerja*, PT. Pertja Jakarta.
- Yani, Ahmad 2008.*Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yoety A.Oka.H 1996. *Pemasaran Pariwisata Terpadu* Penerbit Angkasa. Bandung
- Yoety A. Oka.H 1996 (Revisi) *Pemasaran Pariwisata* Penerbit Angkasa. Bandung
- Yoeti, Oka A. 2001. *Tours And Travel Management*. PT.Pradyana Paramita, Jakarta.
- , 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- , 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang *Retribusi Tempat Rekrasi dan Olah Raga*
- , 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tentang *Tentang Santandar Akuntansi Pemerintahan*
- , 2010, Peraturan Pemerintah RI Tentang *Kepariwisataan*

-----, 2000, Undang-Undang Nomor 34, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

-----, 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tentang Kepariwisata.

-----, <http://tourismbali.wordpress.com/2011/04/10/dimensi-ekonomi-pariwisata-kajian-terhadap-dampak-ekonomi-dan-refleksi-dampak-pariwisata-terhadap-pembangunan-ekonomi-provinsi-bali/>